BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan :

1. Manajemen pendidikan berbasis masyarakat bisa diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian semua sumber, personil, dan materiil dalam dunia pendidikan yang berbasiskan atau melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam ilmu manajemen, istilah partisipasi diartikan sebagai proses pelibatan mental dan emosional dalam suatu aktivitas. Tingkat keberhasilan pendidikan berbasis masyarakat menjadi sangat tergantung pada sejauhmana tingkat keterlibatan masyarakat dan keikutsertaan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Impikasinya adalah tujuan pendidikan, poses pendidikan, sarana pendidikan serta mutu pendidikan termasuk tanggung jawab masyarakat setempat. Mutu madrasah memiliki pengertian yang sama dengan rumusan mutu pendidikan pada umumnya, hanya lebih spesifik pada karakteristik muatan materi agama Islam yang lebih banyak dibandingkan dengan sekolah pada umumnya. Mutu pendidikan yang dimaksudkan disini adalah kemampuan lembaga pendidikan dalam mendayagunakan sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan kemampuan belajar seoptimal mungkin, yang terkait dengan input pendidikan, proses penyelenggaraan pendidikan dan out put pendidikan.
2. Dilihat dari segi historisnya, madrasah Tarbiyatul Banin didirikan pada tahun 1930 M merupakan lembaga pendidikan yang didirikan dan diprakarsai oleh masyarakat setempat dengan melibatkan para ulama, kyai, tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan, maupun tokoh pendidikan dan stakeholder madrasah lainnya. Oleh karena itu dalam pengelolaan lembaga pendidikannya, cenderung menggunakan sistem Manajemen Berbasis

Masyarakat. Hal ini bisa kita lihat dari tingginya tingkat partisipasi masyarakat baik secara emosional, material, finansial, maupun spiritual, sejak dari perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan dan pengendalian madrasah.

3. Implementasi manajemen berbasis masyarakat dalam pengelolaan kelembagaan di madrasah Tarbiyatul Banin Pekalongan Winong Pati telah terlaksana sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Pedoman Operasional Yayasan (POY), dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dirumuskan dalam forum Musyawarah Besar (MUBES) dan Musyawarah Kerja (MUSKER) Yayasan dan ditindaklanjuti melalui forum rapat pimpinan yayasan, pertemuan wali murid, rapat koordinasi selapanan dan rapat-rapat khusus lainnya. Secara kelembagaan pengelolaan organisasi di madrasah Tabiyatul Banin juga melibatkan seluruh stakeholder madrasah dalam bentuk struktur pengelola lembaga yang terdiri dari Majelis Pertimbangan Yayasan (MPY), Badan Pengawas Yayasan (BPY), Dewan Pengurus Yayasan (DPY), Komite Madrasah, dan Paguyuban Wali Peserta didik. Hal ini menjadi bukti nyata adanya partisipasi masyarakat baik secara aktif maupun pasif dalam pengelolaan kelembagaan di madrasah Tarbiyatul Banin.
4. Implikasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kelembagaan di madrasah Tarbiyatul Banin terhadap mutu pendidikan ditunjukkan dengan meningkatnya mutu pendidikan mulai dari *input*, proses maupun *output* madrasah. Kualitas input pendidikan bisa dilihat dari meningkatnya animo masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya di madrasah Tarbiyatul Banin dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang pesat dan *input* peserta didik yang mempunyai prestasi akademik menengah. Kualitas proses pendidikan ditunjukkan dengan prestasi siswa baik akademik maupun non akademik mulai dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau Kelompok Bermain, Raudlatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah maupun Pondok Pesantren baik

di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional. Disamping itu juga ditunjukkan dengan meningkatnya prestasi tenaga pendidik dan kependidikan yang berhasil menjuarai berbagai perlombaan di tingkat daerah maupun penghargaan di tingkat nasional. Meningkatnya mutu output pendidikan ditunjukkan dengan tingkat kelulusan peserta didik yang mencapai 100% setiap tahunnya dan berprestasi dalam pelaksanaan ujian nasional. Disamping itu juga ditunjukkan dengan diterimanya para alumni madrasah Tarbiyatul Banin di perguruan Tinggi favorit melalui jalur beasiswa santri berprestasi, beasiswa bidik misi, dan beasiswa lainnya dari pemerintah, juga para alumni yang sukses dalam berbagai bidang baik pegawai pemerintah, perusahaan maupun wiraswasta.

B. SARAN-SARAN

1. Konsep-konsep tentang Manajemen Berbasis Masyarakat yang penulis kaji dalam tesis ini belumlah seberapa dan masih banyak teori, konsep maupun rumusan Manajemen Berbasis Masyarakat yang perlu kita analisis lebih lanjut, karena masih banyak dijumpai kelemahan-kelemahan dan ketimpangan-ketimpangan yang memerlukan perbaikan dan penyempurnaan. Maka dari itu penulis mengharapkan adanya kajian yang lebih intensif dan mendalam lagi, khususnya kajian tentang implementasi Manajemen Berbasis Masyarakat.
2. Pengelolaan kelembagaan di madrasah Tarbiyatul Banin bisa dijadikan salah satu contoh bentuk implementasi Manajemen Berbasis Masyarakat yang lebih relevan dan sesuai dengan karakteristik madrasah. Namun demikian penulis masih melihat adanya beberapa kekurangan dan kelemahan yang bisa disempurnakan antara lain ;
 - a. Tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pengelolaan kelembagaan di madrasah Tarbiyatul Banin belum sepenuhnya terkonsep secara integral dalam program pengembangan madrasah. Hal ini ditandai dengan belum adanya *Master Plan* Pengembangan Pendidikan untuk jangka menengah dan jangka panjang.

- b. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang mendukung terlaksananya program peningkatan mutu pendidikan seperti penyediaan tanah untuk pengembangan pendidikan, sarana pusat kegiatan siswa dan guru, sarana olah raga, perpustakaan, parkir siswa, aula pertemuan, laboratorium, boarding school yang representatif,
- c. Sistem Pengelolaan keuangan yang sudah tertata dan berjalan baik, masih belum secara penuh dikelola oleh yayasan, sehingga yayasan dan cenderung tersentral di masingmasing satuan pendidikan. Hal ini seringkali menimbulkan kesenjangan antar satuan pendidikan.